

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau karyawan suatu perusahaan swasta yang biasanya dilakukan dalam bentuk menghadiri undangan, bimbingan teknis atau rapat koordinasi kerja antar wilayah (Wati and Selfiana 2016). Kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru, membangun jaringan sosial dan negosiasi bisnis yang biasanya juga disertai dengan perjalanan wisata (Mahfudin, Febrianto, and Lestari 2018).

Perjalanan dinas juga dilakukan oleh pejabat daerah kab. Ponorogo yaitu tepatnya kantor sekretariat daerah yang bertugas untuk menyelenggarakan perjalanan dinas bagi pejabat daerah Kab. Ponorogo yaitu bupati, wakil bupati, ketua PKK, wakil ketua PKK, sekretaris daerah, ketua dharmawanita, staf ahli, dan asisten. Terdapat total 10 *driver* utama dan 3 *driver* cadangan yang selalu siap mengantarkan pejabat untuk melakukan perjalanan dinas ke luar kota, setiap *driver* tetap bertanggung jawab pada satu pejabat daerah. Ketika bagian tata usaha mendapatkan surat undangan dari suatu instansi pada daerah tertentu, surat tersebut ditinjau dari segi urgensi dan jadwal yang tersedia untuk kemudian digunakan sebagai landasan akan dilangsungkan atau tidaknya perjalanan dinas tersebut. Setelah diturunkannya surat perintah tugas (SPT) dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) barulah perjalanan tersebut dapat dilakukan.

Perjalanan dilakukan sehari sebelum acara atau pada hari yang sama bergantung waktu dimulainya acara pada tempat yang dituju. Namun permasalahannya ialah setiap melakukan perjalanan dinas ke suatu daerah tertentu selalu menggunakan uang *driver* terlebih dahulu untuk menutup biaya transportasi berupa biaya bahan bakar kendaraan, biaya masuk gerbang tol dan biaya parkir. Terkadang terjadi perjalanan dinas dua sampai tiga kali dalam sebulan, dana pada perjalanan dinas yang satu belum berhasil dicairkan oleh bagian keuangan namun sudah dilakukan lagi perjalanan dinas berikutnya. Tentu lambatnya proses dan prosedur pengajuan pencairan dana perjalanan dinas terkadang memberatkan *driver*. Prosedur untuk mengajukan pencairan dana bagi *driver* dimulai dari mengajukan surat yang terdiri dari nota atau kwitansi pengeluaran transportasi, SPT dan SPPD. Berkas biasanya dikumpulkan secara kolektif untuk beberapa driver dengan perjalanan dinas berbeda, artinya pengajuan akan diproses jika terdapat beberapa driver yang mengajukan. Berkas tersebut diajukan pertama kepada koordinator *driver*, selanjutnya setelah disetujui maka akan dibawa ke pihak tata usaha untuk diberikan kepada beberapa kepala bagian untuk ditandatangani. Kepala atau bagian yang terlibat yaitu kepala pejabat pembuat komitmen (PPKom), kepada kepala bagian umum, bendahara sekretariat dan bagian keuangan. Ketika dana perjalanan dinas telah dicairkan oleh bagian keuangan maka akan dibawa lagi oleh bendahara sekretariat untuk diberikan kepada koordinator *driver*. Terakhir, koordinator akan menyerahkan dana tersebut kepada driver yang bersangkutan. Prosedur tersebut terkadang memakan waktu satu bulan bergantung pada ada atau tidaknya kepala bagian untuk menandatangani dan ketersediaan dana.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis akan membuat perancangan sistem pengajuan pencairan dana perjalanan dinas bagi *driver* pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo yang diharapkan nantinya sistem tersebut dapat mempersingkat waktu dalam proses dan prosedur pengajuan pencairan dana perjalanan dinas yang sebelumnya dilakukan secara manual.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Masalah yang dapat dirumuskan dari penelitian ini yaitu bagaimana melakukan sistem pengajuan pencairan dana perjalanan dinas bagi *driver* pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk melakukan perancangan sistem pengajuan pencairan dana perjalanan dinas bagi *driver* pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang akan didapat dari perancangan ini yaitu dapat memudahkan pemeriksaan berkas, penyetujuan berkas, pengiriman berkas pencairan dana perjalanan dinas sehingga proses pencairan diharapkan dapat diproses lebih cepat.

1.5. BATASAN MASALAH

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Sistem yang dibangun berbasis web dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
2. Sistem pengajuan pencairan dana perjalanan dinas difokuskan bagi pengeluaran *driver* saja bukan pengeluaran pejabat secara keseluruhan.

